



Bupati Garut

**SAMBUTAN BUPATI GARUT
PADA ACARA PROGRAM SOSIALISASI
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENCANANGAN
"GARUT BERSIH DARI KORUPSI"
RABU, 18 MARET 2009**

ASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB,

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM,

ALHAMDULILLAahirabbil 'Aalamiin, was shalaatu

wassalaamu 'alaa asyrafil anbiyaa-i

walmursaliin, sayyidinaa wamaulana

Muhammadin, wa'alaa aalihii washahbihi

ajma'in, ammaa ba'du

YTH. BAPAK DONI MUHARDIANSYAH DIREKTUR

LITBANG KPK BESERTA SEGENAP ROMBONGAN;

YTH. BAPAK-BAPAK PIMPINAN WILAYAH PRIANGAN
ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT ATAU YANG
MEWAKILI;

YTH. MUSPIDA KABUPATEN GARUT ATAU YANG
MEWAKILI;

YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, DAN
KEPALA SOPD KABUPATEN GARUT;

YTH. PARA CAMAT SE KABUPATEN GARUT;

TAMU UNDANGAN DARI UNSUR MASYARAKAT, TOKOH
AGAMA, PENGUSAHA, PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT, UNSUR PERS, SERTA UNSUR
STAKE HOLDERS LAINNYA YANG TIDAK DAPAT SAYA
SEBUTKAN SATU PERSATU, YANG SAYA HORMATI.

TERLEBIH DAHULU, PUJI DAN SYUKUR MARILAH
KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, SEBAB
HANYA KARENA PERKENANNYA JUA, PADA SAAT YANG
BERBAHAGIA DAN *INSYA* ALLAH PENUH BERKAH INI,

KITA DAPAT BERSILATURAHMI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT, PADA ACARA PROGRAM SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN GARUT. KITA JUGA BERSYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT KARENA KEPADA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN, KEKUATAN, DAN SEMOGA SENANTIASA KESEHATAN UNTUK MELANJUTKAN IBADAH KITA, KARYA KITA, TUGAS, DAN PENGABDIAN KITA BERSAMA KEPADA UMAT, KEPADA MASYARAKAT, KEPADA BANGSA, DAN NEGARA TERCINTA.

KEPADA YANG TERHORMAT BAPAK DONI MUHARDIANSYAH, DIREKTUR LITBANG – KPK KAMI SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT DATANG "WILUJENG SUMPING" DI KABUPATEN GARUT, SEMOGA KEHADIRAN BAPAK MENJADI ANGIN SEGAR YANG MEMBERI HARAPAN BAGI TERWUJUDNYA **"GARUT BERSIH DARI KORUPSI"** SERTA MENJADI MOTIVASI TERSENDIRI BAGI SELURUH PEMANGKU

KEPENTINGAN UNTUK SECARA BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN IDAMAN TERSEBUT. SAYA TEGASKAN SEKALI LAGI BAHWA IDAMAN TERSEBUT ADALAH **"GARUT BERSIH DARI KORUPSI"**

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SAAT INI SUDAH MELUAS DALAM MASYARAKAT, PERKEMBANGANNYA TERUS MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN BAIK DARI JUMLAH KASUS YANG TERJADI DAN JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MAUPUN DARI SEGI KUALITAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEMAKIN SISTEMATIS SERTA LINGKUPNYA YANG MEMASUKI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT. TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA, ANTAR PENYELENGGARA NEGARA, MELAINKAN JUGA

PENYELENGGARA NEGARA DENGAN PIHAK LAIN
SEPERTI KELUARGA, KRONI, DAN PARA PENGUSAHA,
SEHINGGA MERUSAK SENDI-SENDI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA,
SERTA MEMBAHAYAKAN EKISTENSI NEGARA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SIFAT KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA,
SUDAH BUKAN LAGI MERUPAKAN KEJAHATAN YANG
BERSIFAT PERSONAL DAN INSTITUSIONAL, TETAPI
SUDAH MERUPAKAN KEJAHATAN CULTURAL, HAL INI
DISEBABKAN SIKAP MENTAL DAN BUDAYA KERJA
SEBAGIAN BESAR BANGSA KITA, YANG APABILA
MEMPUNYAI JABATAN STRATEGIS DAN DIBERI
KEWENANGAN SULIT UNTUK BERLAKU AMANAH DAN
CENDERUNG BERLAKU **KORUP**. KEMUDIAN BELUM
TERBIASA DENGAN PRINSIP BUDAYA KERJA YANG
MENGEDEPANKAN LEGALITAS, TRANSPARANSI,

AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN MANFAAT SERTA EFISIENSI. DAMPAK DARI SIKAP MENTAL DAN BUDAYA KERJA YANG KORUP TERSEBUT MENAKIBATKAN :

- A) PEMBOROSAN PENGGUNAAN ANGGARAN;
- B) EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN TIDAK BERMANFAAT DAN KUALITAS PEMBANGUNAN RAPUH; C) KEMAJUAN PEMBANGUNAN JALAN DI TEMPAT, DAN
- D) PENDAPATAN PERKAPITA RENDAH.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM, PEMERINTAH TELAH MELETAKKAN LANDASAN KEBIJAKAN YANG KUAT DALAM USAHA MEMERANGI TINDAK PIDANA KORUPSI. BERBAGAI KEBIJAKAN TERSEBUT TERTUANG DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA LAIN :

1. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XI/MPR/1998

TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME;

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME;

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

SELANJUTNYA SESUAI KETENTUAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN KHUSUS YANG MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), YANG MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN KOORDINASI DAN SUPERVISI, TERMASUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

KEGAGALAN PEMBERANTASAN KORUPSI DIMASA LALU DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL YAITU :

1. PEMBERANTASAN HANYA DILAKUKAN PADA TINGKAT BAWAH.
2. PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK DIIKUTI DENGAN REFORMASI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK KEARAH EFISIENSI DAN TRANSPARAN.
3. KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK DIIKUTI DENGAN KEBIJAKAN REKAYASA SOSIAL

BUDAYA, UNTUK MENCIPTAKAN SEBUAH MASYARAKAT YANG ENGGAN MELAKUKAN KORUPSI. HAL YANG LEBIH BERSIFAT FUNDAMENTAL ADALAH MELALUI STRATEGI KEBUDAYAAN DAN REKAYASA SOSIAL. ALTERNATIF INI MERUPAKAN SUATU SOLUSI MELALUI STRATEGI YANG LEBIH FILOSOPIS DAN KITA DAPAT MENARUH HARAPAN YANG LEBIH TINGGI, AKAN PERAN STRATEGI INI, DALAM MERANCANG ULANG BANGUNAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BANGSA KITA DIMASA DEPAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

UPAYA SUNGGUH-SUNGGUH PERLU DILAKSANAKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA PERLU DIPAHAMI BAHWA PENDEKATAN YURIDIS BUKANLAH SATU-SATUNYA CARA UNTUK PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA KORUPSI AKAN TETAPI UNTUK PENCEGAHANNYA PERLU DITUNJANG DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS SEHINGGA TERWUJUD SUATU KONDISI DIMANA TIMBUL BUDAYA MALU PADA DIRI SENDIRI DAN MASYARAKAT DISAMPING TAKUT AKAN SANKSI HUKUM.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN. SELANJUTNYA DENGAN INI SAYA NYATAKAN :

1. SAYA MEMBUKA SECARA RESMI PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN GARUT YANG DIPANDU OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK);
2. MULAI HARI INI, RABU 18 MARET 2009 SAYA CANANGKAN BAHWA : **"GARUT BERSIH DARI KORUPSI"**.

AKHIRNYA HANYA KEPADA ALLAH JUALAH KITA SEMUA
MEMOHON PETUNJUK, TERIRING DENGAN HARAPAN
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MENEMPATKAN
KITA DALAM NAUNGAN RAHMAT DAN AMPUNAN-NYA.
AMIN.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA.
BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

BUPATI GARUT

ACENG HM FIKRI, S.Ag